

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai amanah pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga alokasi anggaran sektor pemerintahan harusnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sistem penganggaran pemerintahan telah banyak dilakukan perubahan-perubahan mendasar.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan adalah diimplementasikannya sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang menggantikan *Line-Item Budgeting*. Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang jelas dan sesuai dengan prioritas daerah. Sehingga prinsip anggaran berbasis kinerja melihat anggaran bukan hanya pada keluaran (*output*) akan tetapi juga melihat dampak yang dihasilkan (*outcome*).

Ketika *output* dan *outcome* digunakan dalam menentukan kinerja sebuah instansi pemerintahan disinilah potensi munculnya senjangan anggaran dapat terjadi. Penyusun anggaran tentunya menginginkan kinerja di instansinya dinilai baik, sehingga anggaran disusun untuk mencapai target yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas sesungguhnya masih jauh lebih tinggi. Banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai ini dapat dikatakan terjadi senjangan anggaran (*budgeting slack*) dalam penyusunan anggaran.

Senjangan anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi. Estimasi yang dimaksud adalah anggaran yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan kemampuan terbaik perusahaan. (Anthony Robert & Vijay, 2004). Senjangan anggaran menggambarkan salah

satu jumlah sumber daya tambahan yang sengaja dibangun manajer dalam anggarannya atau berarti dengan sengaja mengecilkan kemampuan produktifnya (Onsi, 1973).

Permasalahan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada akhir tahun 2019 dapat diduga juga terjadi senjangan anggaran dalam penyusunan anggaran terkait penganggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen sebesar Rp 123,8 miliar yang dijadikan pertanyaan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adanya alokasi belanja (pengeluaran) yang melebihi nilai estimasi wajar merupakan salah satu tanda adanya permasalahan senjangan anggaran.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim & Syam Kusufi, 2016). Sehingga anggaran merupakan alat penting bagi manajemen untuk melaksanakan tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada organisasi sektor publik adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran pada sektor publik memiliki perbedaan yang mendasar dengan organisasi privat dari segi proses dalam organisasinya. Dari segi proses organisasinya, organisasi sektor publik lebih bernuansa politis dibandingkan pada organisasi privat/bisnis, sehingga pelaku didalamnya juga dituntut memiliki kemampuan berpolitik selain kemampuan profesionalitas sebagaimana di sektor privat. Nuansa politis pada organisasi sektor publik khususnya pemerintahan disebabkan oleh sumber dana pada organisasi pemerintahan berasal publik (rakyat) dari pajak dan retribusi yang dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, dalam anggaran pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang direpresentasikan oleh parlemen/legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum.

Pada sektor publik anggaran memiliki fungsi : (Mardiasmo, 2009)

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
- 4) Anggaran sebagai alat politik
- 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- 6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- 7) Anggaran sebagai alat motivasi
- 8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*misappropriation*), atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Proses penganggaran bisa bersifat dari “atas-ke-bawah” atau dari “bawah-ke-atas”. Dengan penyusunan anggaran dari atas-ke-bawah, manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah. Dengan penyusunan anggaran dari bawah-ke-atas, manajer tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran. Tetapi, pendekatan dari atas-ke-bawah jarang berhasil. Pendekatan tersebut mengarah kepada kurangnya komitmen dari sisi pembuat anggaran dan hal ini membahayakan keberhasilan rencana. Proses penyusunan anggaran yang efektif menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Pembuat anggaran mempersiapkan draf pertama anggaran untuk bidang tanggung jawab mereka, yang merupakan pendekatan dari bawah-ke-atas. Tetapi, mereka melakukan hal tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan pendekatan dari atas-ke-bawah. Manajer senior meninjau dan mengkritik anggaran yang diusulkan. Proses persetujuan yang ketat membantu untuk memastikan bahwa pembuat anggaran tidak “main-main” dengan sistem penyusunan anggaran. (Anthony Robert & Vijay, 2004) . Proses penyusunan anggaran yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut telah diadaptasi pada penganggaran di pemerintahan. Pada penyusunan APBD proses penyusunan anggaran dimulai dengan pengajuan anggaran yang tercantum pada dokumen perencanaan (Rencana Kerja Perangkat Daerah ataupun dokumen Rencana Kerja Anggaran) yang kemudian akan diverifikasi dan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendapat persetujuan Kepala Daerah dan dibahas bersama dengan DPRD dan mendapat pengesahan bersama. Sehingga peran (partisipasi) dari pembuat anggaran dalam proses penganggaran pada sektor pemerintahan menjadi hal yang diperlukan akan tetapi perlu dikendalikan supaya partisipasi ini tidak berubah menjadi sesuatu yang negatif.

Senjangan anggaran yang terjadi di DKI Jakarta bisa jadi karena partisipasi pembuat anggaran kurang mendapat evaluasi dari level atas atau pimpinan ataupun bisa jadi informasi terkait kebijakan penyusunan anggaran belum menyentuh atau ditangkap sepenuhnya oleh pembuat anggaran. Oleh karena itu penulis menggunakan partisipasi anggaran dan asimetri informasi sebagai variabel yang mempengaruhi senjangan anggaran. Penelitian terdahulu

(Hormati et al., 2017; Maharani & Ardiana, 2015; Nanda Narotama & Sujana, 2020; Putra & Mintoyuwono, 2019; Widanaputra & Mimba, 2014) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi senjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para manajer akan dapat meningkatkan senjangan anggaran (Venusita, 2009). Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran. Pembatasan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran dilakukan secara proporsional dengan tetap berorientasi pada rencana dan strategi yang telah ditentukan.

Senjangan anggaran dapat terjadi karena kurangnya informasi pembuat anggaran akan kebijakan penyusunan anggaran dan/atau arah kebijakan pelaksanaan kegiatan sehingga estimasi pembuat anggaran dengan manajer senior terhadap anggaran yang telah disusun menjadi berbeda. Perbedaan informasi inilah yang dinamakan sebagai asimetri informasi dalam penyusunan anggaran. Menurut Suartana (2010: 139) bahwa konsep asimetri informasi yaitu atasan mungkin mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan atasan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan, akan muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran. Sebaliknya, jika bawahan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih daripada atasan, maka bawahan akan membuat target anggaran yang lebih rendah daripada yang sebenarnya dapat dicapai. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah dilakukan untuk meneliti pengaruh dari Asimetri Informasi terhadap senjangan anggaran. (Akhmad Azmi Basyir, 2016; Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019; Maharani & Ardiana, 2015; Nanda Narotama & Sujana, 2020)

Banyak penelitian telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi senjangan anggaran. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Persepsi manager dan budaya kerja organisasi publik berpengaruh negatif dalam penciptaan senjangan anggaran (Göhkan & Emine, 2011; Hormati et al., 2017). Penelitian lain menyatakan bahwa perilaku politik dalam organisasi publik berpengaruh positif pada penciptaan senjangan anggaran (Yılmaz et al., 2014). Ada pula yang meneliti bahwa lingkungan yang tidak pasti tidak secara signifikan mempengaruhi senjangan anggaran (Setiawan & Ghazali, 2016).

Permasalahan penyusunan anggaran di DKI Jakarta sebagaimana yang dijelaskan oleh Gubernur Anies Baswedan adalah karena penggunaan teknologi informasi (*ebudgeting*) yang tidak *smart*, karena sistem tidak dapat langsung melakukan verifikasi dan pengujian langsung dan masih memerlukan proses secara manual. Seperti yang diberitakan JawaPos , pada 11 November 2020, bahwa sistem ini (*ebudgeting*) sudah diciptakan (oleh Surabaya) sejak 2003 dan telah diadopsi pemerintah pusat untuk disebarluaskan ke berbagai pemerintah daerah di Indonesia (JawaPos, 2020). *E-budgeting* yang dipakai di DKI Jakarta juga merupakan sistem yang mengadopsi dari Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Syamsul Hariadi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya. (GlobalNews, 2020). Disampaikan pula bahwa tujuan dari penerapan *e-Budgeting* ini adalah untuk meningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaian dengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening, serta akuntabilitas alokasi belanja sehingga proses penyusunan lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Anggaran Surabaya dalam hal proses penganggaran tidak hanya menggunakan *e-budgeting* saja. Surabaya telah membangun sebuah sistem yang saling terintegrasi yang dinamakan Government Resource Management System (GRMS). Berdasarkan situs resmi Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, GRMS adalah sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang dilaksanakan melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai perencanaan kegiatan/anggaran – pelaksanaan – proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengendalian, monitoring serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil. GRMS Surabaya ini dapat dikatakan berhasil, mengingat KPK terus mendorong agar lebih banyak pemerintah daerah menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Saut Situmorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa sistem berbasis elektronik yang transparan dapat mengurangi kecenderungan korupsi pemerintah daerah. (Suarasurabaya.net, 2016). Dengan sistem yang transparan kemungkinan terjadinya *senjangan* anggaran dalam penyusunan anggaran dapat diperkecil risiko terjadinya. Sistem yang transparan akan membuat informasi-informasi dalam kebijakan penyusunan anggaran dapat tersampaikan ke semua lini yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan partisipasi pembuat anggaran pun dapat lebih dikendalikan dengan adanya sistem yang bagus.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada *senjangan* anggaran ((Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019; Maharani & Ardiana, 2015; Nanda Narotama & Sujana, 2020). Akan tetapi penelitian yang dilakukan I Gede Dharma Putu menyatakan sebaliknya bahwa Partisipasi anggaran tidak berpengaruh signifikan

terhadap senjangan anggaran. (Putra & Mintoyuwono, 2019) artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak memberikan informasi bias yang biasa dilakukan dengan meninggikan biaya dan merendahkan pendapatan, sehingga senjangan anggaran yang dapat merugikan suatu instansi tidak terjadi. Partipasi anggaran menunjukkan bagaimana peran bawahan dalam penyusunan anggaran sebuah instansi. Menurut peneliti variabel ini penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan senjangan anggaran mengingat asal mula penyusunan anggaran adalah dari peran pembuat anggaran.

Beberapa peneliti juga meneliti kaitan asimetri informasi dengan senjangan anggaran. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran (Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019; Maharani & Ardiana, 2015; Nanda Narotama & Sujana, 2020). Akan tetapi penelitian lain mengungkapkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh pada senjangan anggaran (Aji & Amir, 2014). Disampaikan bahwa kemungkinan terjadi asimetri informasi di lingkungan pemerintahan sangat kecil, dikarenakan dalam anggaran sektor publik seperti di pemerintahan daerah sudah terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat termasuk aturan yang terkait dengan informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya sesuai dengan kenyataan mengenai kondisi anggaran. Penelitian lain yang juga mengungkapkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran adalah (Nurrasyid, 2015; Sari et al., 2019) Asimetri Informasi adalah suatu kondisi dimana atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil aktual perusahaan. Dunk (dalam Falikhatun, 2007) berpendapat informasi asimetri adalah suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi.

Penelitian terdahulu juga telah melakukan penelitian terhadap pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada Surabaya. Hasil dari penelitian ini Partisipasi anggaran memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap *budgetary slack* dan informasi asimetri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *budgetary slack*. (R. Z. Irfan, 2017). Penelitian yang dilakukan tersebut menggunakan sampel seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, pada penelitian ini mencoba lebih menyempitkan sampel penelitian dengan membuat klasifikasi sampel dengan mengambil perangkat daerah dengan nilai SAKIP tertinggi dan perwakilan dari Tim Anggaran Perangkat Daerah. Bahwa Surabaya telah menggunakan e-

budgeting dalam proses penyusunan anggaran, sebagaimana di DKI Jakarta, perlu juga diteliti penggunaan teknologi informasi ini apakah dapat mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran dan asimetri informasi dalam menciptakan senjangan anggaran di Surabaya.

Penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti penggunaan teknologi informasi dalam kaitannya dengan senjangan anggaran, khususnya pada penganggaran pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Sulistiyani, 2019 menghasilkan bahwa perubahan teknologi berpengaruh terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan teknologi yang sangat pesat akan dapat memberikan suatu kesenjangan dalam anggaran, karena dengan semakin majunya zaman seorang atasan atau bawahan banyak yang menggunakan suatu teknologi untuk pekerjaan, begitu pun dengan berkembangnya suatu teknologi maka semakin mudah untuk menyimpan suatu informasi yang dapat memberikan suatu kesenjangan anggaran. (Sulistiyani, 2019). Variabel perubahan teknologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut merupakan variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel partisipasi anggaran (X) dengan variabel senjangan anggaran (Y). Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa variabel moderasi yang digunakan memberikan arah positif terhadap terciptanya senjangan anggaran.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel teknologi informasi sebagai variabel moderasi dari pengaruh hubungan antara partisipasi anggaran, asimetri informasi terhadap senjangan belum pernah diketemukan lagi, sehingga tidak ada pembandingan dengan penelitian yang lainnya. Akan tetapi, Penelitian lain mengungkapkan bahwa adanya interaksi adaptif IT dan e-procurement yang berdampak pada senjangan anggaran. Bagi pengguna dengan budaya adaptif TI yang tinggi, peningkatan kapabilitas eprocurement akan menurunkan senjangan anggaran (Zahra et al., 2017). Pemanfaatan perubahan teknologi dengan penyusunan anggaran yang manual ke penyusunan berbasis sistem tentunya akan mempengaruhi pada terciptanya senjangan anggaran dalam penyusunan anggaran akan tetapi pemanfaatan teknologi secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan tentunya akan menekan timbulnya senjangan anggaran. Adanya dua hasil penelitian yang berbeda dengan menggunakan teknologi informasi sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan variabel *independent* yang mempengaruhi senjangan anggaran maka perlu untuk dilakukan penelitian lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian sebelumnya sehingga dirasa perlu diuji kembali pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi pada senjangan anggaran dengan dimoderasi dengan perubahan teknologi. Apakah dengan adanya teknologi informasi mampu mempengaruhi hubungan antar variabel. Atas dasar tersebut judul penelitian yang akan diajukan adalah “ Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran dengan Perubahan Teknologi sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perangkat Daerah di Surabaya)”. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Surabaya dikarenakan Kota Surabaya merupakan kota metropolitan sebagaimana DKI Jakarta dan juga Pemerintah Kota Surabaya sebagai inisiator *ebudgeting* yang disebut sebagai salah satu penyebab permasalahan anggaran di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan bukan hanya *ebudgeting*, Pemerintah Kota Surabaya yang pertama memperkenalkan sistem *eprocurement* yang akhirnya diadaptasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dipakai di seluruh Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga, dan Instansi. Sehingga peneliti tertarik mencoba melakukan penelitian apakah penggunaan teknologi informasi di Pemerintah Kota Surabaya dalam pengaruhnya terhadap partisipasi anggaran, asimetri informasi dengan senjangan anggaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana data yang berdasarkan angka-angka dan menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya. Dalam penelitian ini, hasil jawaban dari responden dalam bentuk skor yang pada nantinya akan diolah dalam uji hipotesis. Sumber data dengan menggunakan data primer yang berbentuk kuesioner yang dibagikan di beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dan juga apakah penggunaan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mampu mempengaruhi secara negatif kedua variabel penelitian. Artinya apakah teknologi informasi dapat memperlemah/mengurangi pengaruh hubungan antara variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi terhadap variabel senjangan anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya?
2. Apakah terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya?
3. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya?
4. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap hubungan asimetri informasi dengan senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi penggunaan teknologi informasi mampu mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi penggunaan teknologi informasi mampu mempengaruhi hubungan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat :

1. Memberikan kontribusi positif pada Perangkat Daerah di Lingkungan Surabaya untuk dapat meminimalkan terjadinya senjangan anggaran dalam penyusunan anggaran.

2. Dapat memacu peneliti lain dalam penelitian selanjutnya utamanya kaitan teknologi informasi pada beberapa daerah lain mengingat tuntutan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien cukup tinggi, termasuk dalam hal penganggaran sektor pemerintahan.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan proses penganggaran dalam organisasi pemerintahan.
4. Bagi peneliti akan memacu penelitian selanjutnya dengan indikator yang berbeda yang terkait proses penganggaran di pemerintahan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup pada pengaruh partipasi anggaran dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran dengan variabel moderasi penggunaan teknologi pada proses penyusunan anggaran sebagai satu bagian proses penganggaran di sektor pemerintahan. Penelitian ini juga hanya membatasi pada ruang lingkup Pemerintah Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa Surabaya-lah yang pertama memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) terutamanya penggunaan *ebudgeting* dalam penyusunan anggaran.